



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

**KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR e-0002 TAHUN 2026

TENTANG

**PENETAPAN PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN
DI LINGKUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan bahwa untuk melaksanakan anggaran yang dimuat dalam DPA-SKPD/UKPD, Kepala SKPD/UKPD menetapkan pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD/UKPD sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) SKPD/UKPD;
- b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan tentang Penetapan Pejabat Penatausahaan Keuangan di Lingkungan Kota Administrasi Jakarta Selatan.

Mengingat...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

7. Peraturan...

7. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2016 Nomor 201, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2005) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2007);
8. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2022 Nomor 205, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2037);
9. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2013 Nomor 51038) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2014 Nomor 71034);
10. Peraturan Gubernur Nomor 162 Tahun 2013 tentang Pedoman Penatausahaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2013 Nomor 51039);
11. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2022 Nomor 71023) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibu kota Jakarta Tahun 2023 Nomor 71012);
12. Keputusan Gubernur Nomor 1859 Tahun 2017 Tentang Penetapan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Selaku Pejabat Pengguna Anggaran;

13. Keputusan...

13. Keputusan Gubernur Nomor 357 Tahun 2023 Tentang Kuasa Pengguna Anggaran.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN TENTANG PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN DI LINGKUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
- KESATU : Menetapkan Kepala Bagian Program, Pelaporan dan Keuangan, Para Sekretaris Kecamatan dan Sekretaris Kelurahan sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan di Lingkungan Kota Administrasi Jakarta Selatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KEDUA : Penetapan Pejabat Penatausahaan Keuangan di Lingkungan Kota Administrasi Jakarta Selatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terhitung mulai tanggal 2 Januari 2026 dan tidak terikat periode tahun anggaran.
- KETIGA : Bagi Pejabat Penatausahaan Keuangan yang dijabat oleh Pelaksana Tugas (Plt) dikarenakan kekosongan jabatan maka pemberlakuan sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan sampai dengan ditetapkannya pejabat definitif.
- KEEMPAT : Dalam hal terjadi pergantian personil pejabat yang telah ditetapkan sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan di Lingkungan Kota Administrasi Jakarta Selatan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, setelah serah terima jabatan yang baru langsung menjabat sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan.
- KELIMA : Pejabat Penatausahaan Keuangan di Lingkungan Kota Administrasi Jakarta Selatan memiliki Tugas dan Tanggung Jawab sebagai berikut:
- a. meneliti kelengkapan SPP-LS Pengadaan barang/jasa yang disampaikan oleh Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Pengeluaran Pembantu dan diketahui/disetujui oleh PPTK;
 - b. meneliti...

- b. meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan/atau SPP-LS gaji dan tunjangan PNS serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang diajukan oleh bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu;
- c. melakukan verifikasi SPP;
- d. menyiapkan SPM;
- e. menyiapkan Verifikasi harian atas penerimaan yang dikelola oleh SKPD;
- f. melaksanakan akuntansi SKPD; dan
- g. menyiapkan laporan keuangan SKPD.

- KEENAM : Pejabat Penatausahaan Keuangan di Lingkungan Kota Administrasi Jakarta Selatan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertanggung jawab kepada PA atau KPA.
- KETUJUH : Apabila ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- KEDELAPAN : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur dan ditetapkan kemudian.
- KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut pada tanggal 2 Januari 2026.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Januari 2026

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN



Tembusan :

1. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Bappeda Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan
6. Sekretaris Kota Kota Administrasi Jakarta Selatan
7. Para Asisten Sekretaris Kota Kota Administrasi Jakarta Selatan
8. Inspektur Pembantu Wilayah Kota Kota Administrasi Jakarta Selatan
9. Para Camat Kota Administrasi Jakarta Selatan
10. Para Kepala Bagian Setko Kota Administrasi Jakarta Selatan
11. Para Lurah Kota Administrasi Jakarta Selatan

Lampiran :
Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan
Nomor : e-0002 TAHUN 2026
Tanggal : 14 Januari 2026
Tentang
Penetapan Pejabat Penatausahaan di Lingkungan Kota
Administrasi Jakarta Selatan Tahun Anggaran 2026

**PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN
DI LINGKUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2026**

No.	Unit Kerja	Pejabat Penatausahaan Keuangan
1	2	3
1	Sekretariat Kota Kota Administrasi Jakarta Selatan	Kepala Bagian Program, Pelaporan dan Keuangan
2	Kecamatan Kebayoran Lama	Sekretaris Kecamatan Kebayoran Lama
3	Kelurahan Kebayoran Lama Utara	Sekretaris Kelurahan Kebayoran Lama Utara
4	Kelurahan Kebayoran Lama	Sekretaris Kelurahan Kebayoran Lama Selatan
5	Kelurahan Grogol Utara	Sekretaris Kelurahan Grogol Utara
6	Kelurahan Grogol Selatan	Sekretaris Kelurahan Grogol Selatan
7	Kelurahan Pondok Pinang	Sekretaris Kelurahan Pondok Pinang
8	Kelurahan Cipulir	Sekretaris Kelurahan Cipulir
9	Kecamatan Pesanggrahan	Sekretaris Kecamatan Pesanggrahan
10	Kelurahan Petukangan Utara	Sekretaris Kelurahan Petukangan Utara
11	Kelurahan Ulujami	Sekretaris Kelurahan Ulujami
12	Kelurahan Bintaro	Sekretaris Kelurahan Bintaro
13	Kelurahan Pesanggrahan	Sekretaris Kelurahan Pesanggrahan
14	Kelurahan Petukangan Selatan	Sekretaris Kelurahan Petukangan Selatan
15	Kecamatan Pasar Minggu	Sekretaris Kecamatan Pasar Minggu
16	Kelurahan Cilandak Timur	Sekretaris Kelurahan Cilandak Timur
17	Kelurahan Jatipadang	Sekretaris Kelurahan Jatipadang
18	Kelurahan Kebagusan	Sekretaris Kelurahan Kebagusan
19	Kelurahan Pasar Minggu	Sekretaris Kelurahan Pasar Minggu
20	Kelurahan Pejaten Barat	Sekretaris Kelurahan Pejaten Barat
21	Kelurahan Pejaten Timur	Sekretaris Kelurahan Pejaten Timur
22	Kelurahan Ragunan	Sekretaris Kelurahan Ragunan
23	Kecamatan Jagakarsa	Sekretaris Kecamatan Jagakarsa
24	Kelurahan Lenteng Agung	Sekretaris Kelurahan Lenteng Agung
25	Kelurahan Jagakarsa	Sekretaris Kelurahan Jagakarsa
26	Kelurahan Ciganjur	Sekretaris Kelurahan Ciganjur
27	Kelurahan Srengseng Sawah	Sekretaris Kelurahan Srengseng Sawah
28	Kelurahan Tanjung Barat	Sekretaris Kelurahan Tanjung Barat
29	Kelurahan Cipedak	Sekretaris Kelurahan Cipedak
30	Kecamatan Mampang Prapatan	Sekretaris Kecamatan Mampang Prapatan
31	Kelurahan Bangka	Sekretaris Kelurahan Bangka
32	Kelurahan Mampang Prapatan	Sekretaris Kelurahan Mampang Prapatan
33	Kelurahan Pela Mampang	Sekretaris Kelurahan Pela Mampang
34	Kelurahan Tegal Parang	Sekretaris Kelurahan Tegal Parang
35	Kelurahan Kuningan Barat	Sekretaris Kelurahan Kuningan Barat
36	Kecamatan Pancoran	Sekretaris Kecamatan Pancoran
37	Kelurahan Pancoran	Sekretaris Kelurahan Pancoran
38	Kelurahan Duren Tiga	Sekretaris Kelurahan Duren Tiga
39	Kelurahan Kalibata	Sekretaris Kelurahan Kalibata
40	Kelurahan Rawajati	Sekretaris Kelurahan Rawajati
41	Kelurahan Pengadegan	Sekretaris Kelurahan Pengadegan
42	Kelurahan Cikoko	Sekretaris Kelurahan Cikoko
43	Kecamatan Kebayoran Baru	Sekretaris Kecamatan Kebayoran Baru
44	Kelurahan Gandaria Utara	Sekretaris Kelurahan Gandaria Utara
45	Kelurahan Cipete Utara	Sekretaris Kelurahan Cipete Utara
46	Kelurahan Pulo	Sekretaris Kelurahan Pulo
47	Kelurahan Petogogan	Sekretaris Kelurahan Petogogan
48	Kelurahan Melawai	Sekretaris Kelurahan Melawai
49	Kelurahan Kramat Pela	Sekretaris Kelurahan Kramat Pela
50	Kelurahan Gunung	Sekretaris Kelurahan Gunung

No.	Unit Kerja	Pejabat Penatausahaan Keuangan
1	2	3
51	Kelurahan Selong	Sekretaris Kelurahan Selong
52	Kelurahan Rawa Barat	Sekretaris Kelurahan Rawa Barat
53	Kelurahan Senayan	Sekretaris Kelurahan Senayan
54	Kecamatan Setiabudi	Sekretaris Kecamatan Setiabudi
55	Kelurahan Setiabudi	Sekretaris Kelurahan Setiabudi
56	Kelurahan Karet	Sekretaris Kelurahan Karet
57	Kelurahan Guntur	Sekretaris Kelurahan Guntur
58	Kelurahan Karet Semanggi	Sekretaris Kelurahan Karet Semanggi
59	Kelurahan Karet Kuningan	Sekretaris Kelurahan Karet Kuningan
60	Kelurahan Kuningan Timur	Sekretaris Kelurahan Kuningan Timur
61	Kelurahan Menteng Atas	Sekretaris Kelurahan Menteng Atas
62	Kelurahan Pasar Manggis	Sekretaris Kelurahan Pasar Manggis
63	Kecamatan Tebet	Sekretaris Kecamatan Tebet
64	Kelurahan Menteng Dalam	Sekretaris Kelurahan Menteng Dalam
65	Kelurahan Tebet Timur	Sekretaris Kelurahan Tebet Timur
66	Kelurahan Tebet Barat	Sekretaris Kelurahan Tebet Barat
67	Kelurahan Bukit Duri	Sekretaris Kelurahan Bukit Duri
68	Kelurahan Manggarai Selatan	Sekretaris Kelurahan Manggarai Selatan
69	Kelurahan Kebon Baru	Sekretaris Kelurahan Kebon Baru
70	Kelurahan Manggarai	Sekretaris Kelurahan Manggarai
71	Kecamatan Cilandak	Sekretaris Kecamatan Cilandak
72	Kelurahan Gandaria Selatan	Sekretaris Kelurahan Gandaria Selatan
73	Kelurahan Cipete Selatan	Sekretaris Kelurahan Cipete Selatan
74	Kelurahan Cilandak Barat	Sekretaris Kelurahan Cilandak Barat
75	Kelurahan Pondok Labu	Sekretaris Kelurahan Pondok Labu
76	Kelurahan Lebak Bulus	Sekretaris Kelurahan Lebak Bulus

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

